



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 23 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek Dibidik KPK Pernah jadi Temuan

KOTA MANNA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih mendalami hasil penggeledahan dua hari berturut-turut di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) atas kasus suap yang menyeret Bupati BS

(Nonaktif), Dirwan Mahmud. Dugaan penggeledahan dilakukan lembaga antirasuah ini karena membidik dugaan suap untuk paket lebih besar di Dinas PUPR, seperti hotmix.

► **Baca PROYEK Hal 11**

GUSNAN MULYADI

Sambungan dari halaman 1

Apalagi pada hasil pemeriksaan rutin oleh tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu tahun lalu, auditor pemerintah ini menemukan kelebihan bayar mencapai Rp 4 miliar pada paket hotmix tahun 2016. Yang ditindaklanjuti dengan pengembalian kelebihan bayar oleh rekanan.

Informasi digali RB, sejak tahun 2016 atau Dirwan Mahmud menjabat sebagai Bupati BS paket hotmix nilainya puluhan miliaran rupiah ini diduga dikuasai "grup AJM" beralamat di Jalan Iskandar Baksi (kantor dan rumah pemilik ikut digeledah KPK). Pengusaha dan isterinya ini terkenal dekat dengan bupati nonaktif, termasuk dengan isteri muda Dirwan Mahmud, Heni Dirwan (tersangka).

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa alat berat dan material hotmix ini diduga tidak hanya memiliki anak perusahaan lain untuk menawarkan jasa, yaitu PT Persona Karya Abadi (PKA) namun juga informasinya diduga kerap menaungi dan meminjam perusahaan lain untuk mengikuti lelang paket di lingkungan Pemkab BS.

Data diperoleh dari LPSE Kabupaten BS, pada tahun 2016 beberapa paket hotmix dimenangkan oleh PT PKA. Meliputi peningkatan jalan (hotmix) di Jl. Desa Simpang Pino-Kantor Camat Ulu Manna Rp 4,7 M, Jl. Desa Padang Lebar-Pinjo Layang Rp 5,5 M, Jl. Ds Bintasan-Telago Dalam-Cinto Mandi Rp 5,5 M, Jl. Trans Sulau Rp 4,7 M, Jl. Ds. Talang Randai-Padang Nibung Rp 5,5 M. Kemudian tahun 2017, PT PKA kembali mendapat paket hotmix di Jl. Desa Padang Jawi-Matai Rp 3,13 M.

Menurut sumber RB, selain menggunakan anak perusahaannya langsung, "Grup AJM" juga diduga menggunakan perusahaan lain, yaitu PT Wahana Indo Perkasa. Tahun 2017, perusahaan ini mendapatkan paket Jl. Desa Karang Cayo Rp 3,9 M, Jl. Talang Randai-Padang Nibung Rp 3,2 M. Pada tahun 2017, hanya beberapa perusahaan diluar "grup AJM" memenangkan lelang, selebihnya masih bernaung dipayung yang sama. "Kalau 2016, itu rata-rata perusahaan yang memenangkan lelang masih

grup yang sama, dan dipinjam," kata sumber RB yang juga kontraktor di Kabupaten BS ini.

Mantan Kadis PUPR Kabupaten M Suhadi ditemui di Kantor Bupati BS yang kediaman pribadinya ikut digeledah oleh KPK sabtu (19/5), saat dikonfirmasi mengenai paket hotmix pada saat dirinya menjabat sebagai kadis, mengaku sudah tidak ingat lagi. Suhadi juga membantah bahwa dirinya sudah menjalani pemeriksaan di Polres BS. "Salah itu tidak pernah saya diperiksa oleh KPK," elak Kadis Perhubungan Kabupaten BS saat ini.

Sementara itu hingga kemarin dari pihak "Grup AJM" masih bungkam terkait penggeledahan di kantor dan rumah pribadi Direktur PT AJM. Begitu juga terkait dugaan penggunaan perusahaan lain untuk memenangkan paket hotmix, hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi. Pihak keluarga maupun karyawan grup ini masih tertutup dengan media.

Plt Gub Ikut Prihatin

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. drh H. Rohidin Mersyah, MMA saat kunjungannya ke Kabupaten BS dalam rangka kegiatan safari Ramadan di Masjid Rukis, Senin malam (21/5) mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang menimpa Bupati BS non aktif Dirwan Mahmud. "Ini musibah bagi BS, tapi bukan berarti membuat pejabat dan ASN malas bekerja. Jalankan amanah dengan baik tanpa melanggar aturan yang berlaku," ujar Rohidin dalam sambutannya pada acara safari Ramadan di masjid Rukis.

Senada, Plt Bupati BS Gusnan Mulyadi SE, MM juga meminta agar semua pihak dapat menahan diri, tidak membuat status dan memberikan komentar secara berlebihan melalui media sosial terkait OTT oleh KPK Selasa malam (15/5), yang dapat menjadi pemicu konflik. Lantaran dari pantauan dan laporan diterimanya status dan komentar banyak sudah melenceng hingga membicarakan pribadi. Hal ini tidak hanya meresahkan keluarga besar Dirwan namun dapat menjadi pemicu konflik dengan pendukung DG (Dirwan-Gusnan) pada pilkada 2015 lalu. (key)